



Kemitraan Strategis Indonesia-Amerika Serikat dalam Mempengaruhi Perilaku Politik Luar Negeri China

(The US-Indonesia Strategic Partnership in Influencing China's Foreign Policy Behavior)

Moh. Abdusy Syukur
mabdusy96@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena sosial persaingan antara Amerika Serikat dan China. Kemitraan Strategis AS-Indonesia sejak November 2010 telah menjadi kekuatan pendorong untuk mengkaji hubungan Tiongkok-AS. Perkembangan geopolitik dan krisis keamanan kawasan akibat persaingan antara dua polarisasi utama menyebabkan fluktuasi dalam sistem internasional. Kepentingan nasional Indonesia diimplementasikan dalam keseimbangan yang dinamis dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dengan kerangka analisis melalui penggalian data, arsip dan pengaruh dalam aspek keamanan nasional dan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pola hubungan Amerika Serikat dan Indonesia yang membangun kemitraan strategis merupakan langkah Amerika Serikat untuk memanfaatkan kepentingan nasional Indonesia dalam desain yang mempengaruhi China. Metode analisis isi akan digunakan dalam artikel ini. Dari lebih dari 20 artikel yang dirujuk di sini, dapat disimpulkan bahwa kemitraan Amerika Serikat dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia dilakukan untuk melayani kepentingan nasionalnya sendiri. Persaingan antara dua kekuatan besar tersebut tidak hanya dilakukan secara terbuka di antara mereka tetapi juga dengan memanfaatkan negara mitra, untuk bersatu melawan satu sama lain dan berfungsi sebagai kelompok kolektif.

Kata Kunci: Diplomasi, Hegemoni, Kemitraan Komprehensif, Hubungan Internasional

Abstract

This article aims to examine the social phenomena of the rivalry between the United States and China. The US-Indonesia Strategic Partnership since November 2010 has been a driving force to examine the Sino-US relationship. Geopolitical developments and regional security crises resulting from competition between the two main polarizations cause fluctuations in the international system. The national interest of Indonesia is implemented in a dynamic equilibrium with countries in the Asia Pacific region with an analytical framework through exploration of data, archives and influence in the aspects of national security and foreign policy that are free and active. The pattern of relations between the United States and Indonesia which



builds a strategic partnership is a move by the United States to utilize Indonesia's national interests in a design that affects China. Content analysis method will be used in this article. From more than 20 articles referenced here, it can be summarized that United States of America's partnership with developing countries such as Indonesia is done in order to serve its own national interest. The rivalry between the two great powers is not only done openly between them but also by utilizing partner countries, to band together against each other and to serve as collective groups.

Keywords: Diplomacy, Hegemony, Comprehensive Partnership, International Relations

1. Pendahuluan

Hubungan internasional adalah bidang studi interdisipliner dalam ilmu politik. Realis dalam Teori Politik Internasional Kenneth Waltz (1979). Struktur sistem internasional anarkis mendorong negara-negara untuk mempertahankan kebijakan yang moderat dan isolasionis untuk menciptakan keamanan. Menggarisbawahi pentingnya dan peran struktur sistem internasional sebagai penentu utama perilaku negara, struktur ditentukan oleh prinsip-prinsip tatanan sistem internasional, secara tradisional anarki dan alokasi sumber daya antar entitas, yaitu negara tanpa status yang diakui otoritas sentral yang memaksa negara untuk memaksimalkan kekuatan dan pengaruh mereka untuk mencapai keamanan dan kemakmuran melalui supremasi dan hegemoni. Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan kompetitif strategis yang berperan penting dalam percaturan politik global. Keterlibatan dua kekuatan utama di Asia Tenggara, Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan China sebagai *new emerging power*, telah mengarahkan strategi politik Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Perdamaian dan perimbangan kekuasaan, kondisi pasca Perang Dingin, merosotnya hegemoni Amerika menjadi peluang peralihan kekuasaan, hasrat perang meningkat pada peralihan kekuasaan, dimana A.F.K Organski merumuskan teori peralihan kekuasaan pada tahun 1958, yaitu kebalikan dari keseimbangan kekuasaan.



Dalam Politik Dunia, ia menyimpulkan bahwa hubungan antara keseimbangan kekuasaan dan perdamaian tidak dapat dipertahankan. Periode keseimbangan, menurut Organski, nyata atau imajiner, adalah periode perang.

Joseph Grieco (1988a) adalah seorang sarjana realis/neorealis yang berfokus pada konsep keunggulan relatif dan absolut. Grieco berpendapat bahwa negara tertarik untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka (keunggulan absolut) dan dengan demikian akan bekerja sama dengan negara lain atau aktor sistem untuk meningkatkan kemampuan mereka. Perhatikan juga dua kesalahpahaman umum dalam hubungan internasional: (a) melebih-lebihkan pengaruh dan kepentingan diri kita sendiri (Jervis 1976) dan (b) berfantasi (misalnya orang menyukai kita karena "nilai" kita) (Goh, 2019). Dalam varian realisme defensif diasumsikan bahwa negara dalam sistem internasional selalu mencari keamanan, namun jika serangan itu menguntungkan, maka negara akan lebih memilih menyerang daripada defensif, demikian pula China. Serangan akan lebih menguntungkan China daripada pertahanan jika kemampuan militernya sama atau melebihi kemampuan militer Amerika Serikat, sehingga kemungkinan menang dalam perang akan lebih besar. (Dian & Meijer, 2020)

Membahas persaingan di Lingkar Pasifik sama saja dengan persaingan antara kekuatan besarnya. Odgaard (2007) menyatakan bahwa hanya ada dua kekuatan di Pasifik yang memenuhi persyaratan poros utama, yaitu China karena kekuatan ekonominya dan Amerika Serikat karena kekuatan militernya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebangkitan China dan upayanya untuk menyeimbangkan kembali Amerika Serikat di kawasan telah mendorong negara-negara lain untuk melindungi dan memperkuat negaranya. Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dan multilateral melalui kemitraan strategis dan kemitraan strategis komprehensif. Selama kemitraan strategis Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi salah satu motor penggerak dalam upaya memahami hubungan China-AS.



Lingkungan yang kompetitif menawarkan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan kepentingan mereka sehubungan dengan status internasional mereka. Menurut asumsi sebelumnya, negara-negara tersebut cenderung mengambil keuntungan dari apa yang terjadi dan mengejar kepentingan nasionalnya. Dan secara umum pemikiran strategis kawasan didasarkan pada dua prinsip dasar yaitu ketidakpastian dan diversifikasi (Gill, Goh & Huang, 2016). Kepentingan nasional berakar kuat dalam literatur hubungan internasional. Meminjam pemikiran tradisional sosok realistik H. J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations*, berpendapat bahwa kepentingan, sering diartikan sebagai kekuasaan, menentukan arah hubungan antar negara (Hadiwinata, 2017). Hal ini selanjutnya mendasari salah satu konsep pemikiran *realisme* terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara berpangkal dari kepentingan nasional negara tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

a. Kebijakan Luar Negeri

Dalam studi hubungan internasional, kebijakan luar negeri muncul dari pandangan realis klasik Morgenthau pada tahun 1948. Menurut kaum realis, negara mencerminkan sifat egois manusia, dan tercermin dalam tindakan suatu negara terhadap negara lain dalam menjaga keamanan dan bertahan hidup. Halaman rumah. struktur anarki internasional. Politik luar negeri terus berkembang dan berevolusi dengan munculnya perspektif-perspektif baru dalam kajian hubungan internasional. Menurut Hudson, analisis kebijakan luar negeri adalah subdisiplin ilmu hubungan internasional yang mencoba menjelaskan politik luar negeri atau perilaku kebijakan luar negeri atas dasar teoritis para pengambil keputusan yang bertindak sendiri atau sesuai dengan prinsip-prinsip kelompok kebijakan luar negeri. Menurut Padleford dan Lincoln, kebijakan luar negeri adalah elemen kunci dalam proses dimana negara



menerjemahkan tujuan dan kepentingan yang dipahami secara luas ke dalam tindakan nyata dan untuk mencapai tujuan tersebut dan mempromosikan kepentingan mereka.

Goh (2008) mengungkapkan perdebatan ahli tentang anomali Pasifik dengan pertanyaan besar tentang struktur hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara, yang dipandang berusaha menyeimbangkan, bermain dan berjudi antara kepentingan kekuatan besar. Lingkungan yang kompetitif menawarkan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan minat mereka terkait dengan status internasional mereka. Secara umum pemikiran strategis kawasan didasarkan pada dua prinsip dasar yaitu ketidakpastian dan diversifikasi (Gill, Goh & Huang, 2016). Menurut prinsip ketidakpastian, negara (kekuatan yang relatif kecil atau sedang) menunjukkan kepentingan bersama mereka kepada aktor yang lebih besar. Dalam kaitan ini, negara-negara Asia Tenggara peka terhadap peran penting Amerika Serikat dalam keamanan kawasan guna mengantisipasi perkembangan kekuatan China. Sementara itu, prinsip diversifikasi tergambar dari situasi negara-negara Asia Tenggara yang tidak dapat mengelak dari ambisi kekuatan-kekuatan besar, tetapi dapat mencoba mendiversifikasi ketergantungan ekonomi dan strategisnya dengan mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China.

b. Politik Luar Negeri dan Diplomasi

J.R. Childs menjelaskan perbedaannya secara sederhana: jika kebijakan luar negeri adalah substansi dari hubungan luar negeri, maka diplomasi adalah proses dimana politik dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diplomasi menyediakan mekanisme dan personel untuk melaksanakan kebijakan luar negeri (Roy, 1991:33). Ivo Duchacek percaya bahwa penting bagi negara untuk merumuskan kebijakan luar negerinya dengan kekuatan dan kemauannya sendiri. Artinya suatu negara harus mengetahui apa yang diinginkannya, apa kekuatannya dan negara mana yang menjadi sekutunya, posisinya di antara negara lawan atau netral lainnya dan tujuan



nasionalnya. Kemitraan komprehensif, yang kemudian menjadi kemitraan strategis, harus berupaya untuk membentuk struktur, prioritas, dan tujuan hubungan sedemikian rupa sehingga membuat hubungan negara lebih terukur dan dapat diprediksi (Hamilton-Hart & McRae, 2015).

Sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sering disebut sebagai negara berkaki dua, memanfaatkan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia melihat perdagangan global yang melewati lintas laut di Indonesia, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sebagai peluang untuk menjadi tumpuan maritim dunia, meningkatkan akses ke pasar-pasar penting dan berbagai barang dari kekuatan gabungan dua negara adidaya yang diperoleh (Hamilton - Hart & McRae, 2015).

Gregory Winger mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penggunaan secara damai lembaga pertahanan suatu negara untuk mengkooptasi lembaga pemerintah negara lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lihat pengantar Seng Tan dan Bhubeva Singh untuk edisi khusus Keamanan Asia tentang penggunaan diplomasi pertahanan di Asia (2012). Tan dan Singh menekankan bahwa diplomasi pertahanan memiliki dua aspek: pragmatis dan transformatif. Bentuk diplomasi pertahanan pragmatis bertujuan untuk mempertahankan kondisi terkini antara dua negara atau dalam suatu kawasan, sedangkan diplomasi pertahanan transformatif berupaya mengubah kondisi yang ada secara fundamental.

Budiono mengatakan bahwa diplomasi merupakan alat untuk melaksanakan politik luar negeri, namun di sisi lain juga merupakan seni berbisnis dengan negara lain yang memiliki kepentingan nasional yang sama namun tidak sama. Dalam mengejar kepentingan nasional, diplomasi akan berurusan dengan penghapusan isu-isu yang merugikan kepentingan nasional, mempertahankan kepentingan nasional, dan menjaga kondisi yang diperlukan untuk kepentingan nasional (Budiono, 1987:58).



c. Kepentingan Nasional

Menurut Oppenheim, konsep kepentingan nasional mengacu pada tujuan sosial pemerintah nasional dalam skala internasional, seperti mempertahankan kemerdekaan politik dan integritas wilayah. Sedangkan menurut David Clinton, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan bersama secara umum dari seluruh rakyat di negara tersebut. Sistem internasional tentu saja tidak terkendali, sehingga diperlukan otoritas internasional yang terpusat untuk memfokuskan kepentingan nasional guna mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masing-masing negara.

Kepentingan nasional secara normatif merupakan tujuan suatu negara yang dapat dicapai melalui hubungannya dengan negara lain (Codevilla & Seabury, 2006). Visi pamungkas ini memandu kepentingan nasional, yang diwujudkan melalui terciptanya hubungan timbal balik dengan negara lain. Nuechterlein (1976) mengemukakan pandangan para ahli tentang keselarasan kepentingan nasional yang terbagi dalam empat dimensi utama, yaitu dimensi pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologis.

Bagi Indonesia, membangun hubungan dengan AS dan China memiliki makna yang ambigu. Di satu sisi menciptakan persaingan, di sisi lain dapat menciptakan kerjasama. Kunci utama dari strategi tersebut adalah mengembangkan jenis kapabilitas yang akan dikembangkan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang terbatas dan memaksimalkan pengaruh internasional (Goldstein & Pevehouse, 2014). Oleh karena itu, Indonesia akan menggunakan hubungan ini untuk memajukan kepentingan nasionalnya dengan mengadopsi strategi kerja sama dan melibatkan dua negara besar yang sedang bersaing.

3. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan studi kepustakaan kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan



kepustakaan dari buku, jurnal, dokumen pemerintah dan sumber digital, serta kepustakaan (*library research*) dan metode online. Metode kepustakaan atau *library research* adalah suatu metode yang mengumpulkan data berdasarkan buku-buku, teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis sekunder yang mampu menggambarkan berbagai praktek analisis dengan menggunakan data yang ada, baik yang dikumpulkan oleh peneliti, yang lain mengutip jurnal dan situs web lembaga pemerintah yang ada.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Menurut Creswell (2014), metode deduktif adalah metode analisis yang dimulai dengan teori atau konsep kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang muncul. Dalam artikel ini, konsep kepentingan nasional dan keseimbangan dinamis merupakan konsep esensial yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil kajian pustaka dan analisis data pembahasan menjadi indikator utama rumusan masalah yang menjadi kesimpulan dalam fenomena ini. Artikel ini berfokus pada kajian hubungan strategis yang lebih luas antara Indonesia dan Amerika Serikat dari perspektif diplomatik, politik, keamanan, dan ekonomi selama satu dekade terakhir. Batas waktu ditetapkan sebagai fokus waktu penelitian untuk memudahkan analisis masalah. Apalagi, konsep keseimbangan dinamis menjadi perbincangan hangat dalam fenomena politik Indonesia pada masa itu.

4. Pembahasan

a. Memahami Perkembangan Politik Luar Negeri China

China mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat pasca Deng Xiaoping melakukan reformasi terhadap sistem ekonomi China. Setelah itu China muncul sebagai kekuatan baru dunia, pasca berakhirnya Perang Dingin China semakin memperluas pengaruhnya terhadap perekonomian dunia. Hal tersebut diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan luar negeri pemimpin China melalui



caranya masing-masing, China berupaya memberikan pengaruh terhadap negara-negara di dunia yang menguntungkan bagi China termasuk didalamnya kawasan Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara merupakan salah satu tetangga terdekat China dan sedang berkembang, sehingga China dapat menjadikan Asia Tenggara sebagai pasar, partner ekonomi dan tentu saja menanamkan pengaruhnya.

Politik luar negeri China memiliki karakteristik yang sangat dinamis. China sebagai salah satu negara besar sedang berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional terutama di kawasan Asia-Pasifik. Politik luar negeri China sangat mempengaruhi kemakmuran dan kondisi dalam negerinya. Sehingga efektif atau tidaknya sebuah kebijakan luar negeri China yang diformulasikan kepada negara lain atau di dunia internasional akan sangat penting bagi kemajuan negara China.

Dalam membentuk kebijakan luar negerinya, Tiongkok tetap berpegang pada pedoman warisan komunis yaitu membawa warisan kepemimpinan sejak awal, hal ini terjadi sejak masa Mao Zedong hingga Xi Jinping saat ini. Sebagai negara dengan sistem politik komunis, kebijakan luar negeri China berfokus pada jalan tengah. Intinya setiap kebijakan luar negeri di China ditentukan oleh pemimpin dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, kepemimpinan China dalam pengambilan keputusan di luar negeri ditentukan oleh proses *think tank* atau kelompok politbiro pemerintah China.

Politbiro adalah sebuah lembaga eksekutif di Partai Komunis China (PKC) yang mengurus dan memutuskan suatu masalah. Pemerintahan China dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri telah dikendalikan oleh *politbiro*. Kebijakan yang diambil juga dipengaruhi oleh Partai Komunis China (PKC). Setiap satu bulan sekali PKC rutin untuk melakukan beberapa kali rapat untuk merumuskan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah China dan tidak dipublikasikan. *Politbiro* dipimpin oleh *Politbiro Standing Comitee* yang merupakan lembaga pembuatan keputusan terakhir China.



China tetap berkomitmen untuk meningkatkan kemajuan negaranya, terutama dengan reformasi besar China yang telah mengukuhkannya sebagai gelar tersendiri di kancah internasional. China mampu bersaing secara maksimal, meski selalu ada penentangan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin di setiap zaman. Namun pada dasarnya China optimis untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional.

Kebijakan luar negeri China mengikuti kebijakan perdamaian independen. Politisi ingin menciptakan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. China berusaha untuk memperkuat perannya di dunia internasional dengan mempromosikan modernisasi, keterbukaan, dan perubahan. Dalam rangka membangun tatanan ekonomi dan politik dunia baru, Tiongkok berharap agar dunia internasional dapat mencapai perdamaian jangka panjang yang dapat mendukung pembangunan semua negara di dunia (Taniputera 2011, 600). Tiongkok juga menerapkan lima prinsip untuk kelangsungan hidup negaranya, yaitu menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menolak saling menyerang, kesetaraan dan saling menguntungkan, serta hidup berdampingan secara damai.

China tidak memasukkan faktor ideologis ke dalam kebijakan luar negerinya. Tujuan utama kebijakan luar negeri Tiongkok adalah memprioritaskan kepentingan bersama dan membuat kemajuan melalui kerja sama. Melalui kerja sama ini, China berharap dapat meningkatkan pengaruhnya di berbagai negara yang bekerja sama dengannya. Maka manfaat kerjasama dapat dinikmati bersama. Itu sebabnya China mengutamakan kerja sama dengan berbagai negara, berkembang dan maju, untuk mendorong kemandirian dan keterbukaan di dunia internasional. Pengembangan lingkungan strategis khususnya di era Xi Jinping kawasan Asia Tenggara menjadi bagian penting dari gagasan besar China yang bertujuan menghubungkan dunia melalui mega proyek *One Belt One Road Initiative* (OBOR). Beberapa negara Asia



Tenggara akan menjadi penting. Menjadi bagian dari ini, karena jalur darat dan laut diangkut, infrastruktur negara-negara Asia Tenggara ini juga akan tumbuh setelah China bersedia memberikan pinjaman melalui *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) untuk proyek-proyek strategis di Asia Tenggara seperti rel kereta api, jalan tol, pelabuhan, dan bandara (Lisbet, 2015).

China ternyata lebih menjadi pelopor regional di era Xi Jinping. Seperti OBOR yang berbasis di Beijing, China dan AIIB adalah pemodal utama di China. Diplomasi yang digunakan Xi Jinping tidak terbatas pada soft power, tetapi juga menggunakan hard power dalam tugas-tugas untuk mencapai tujuan besarnya, seperti memulihkan dan membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Dengan pengaruh yang begitu besar di ASEAN saat ini, tidak bisa dipungkiri China bisa menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai model bagi negara-negara Asia Tenggara di era Xi Jinping.

b. Kemitraan komprehensif Amerika Serikat-Indonesia

Kemitraan Kerjasama Komprehensif merupakan kesepakatan yang dilaksanakan oleh kedua negara yang menunjukkan komitmen jangka panjang untuk memperluas, memperdalam dan memperkuat hubungan bilateral. Inisiatif pembentukan kemitraan ini datang dari Indonesia di bawah arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada USINDO Luncheon, 14 November 2008 di Washington. Saat itu, pemerintah menilai hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan Amerika Serikat masih perlu dioptimalkan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat kedua negara. Presiden SBY menegaskan, kerja sama ini dilandasi kesetaraan dan saling menguntungkan, serta yang tak kalah penting bukan aliansi.

Dalam kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Jakarta pada 9 November 2010 lalu, kemitraan komprehensif kedua negara telah diratifikasi. Naskah Deklarasi Bersama Kemitraan Komprehensif antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat



menegaskan bahwa kedua negara membutuhkan kemitraan ini untuk menghadapi tantangan abad ke-21 yang semakin kompleks, seperti isu perubahan iklim, energi baru dan terbarukan. (EBT) dan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Rencana aksi kolaboratif ini mencakup tiga pilar, yakni (1) politik dan keamanan, (2) ekonomi dan pembangunan, serta (3) sosial budaya, pendidikan, iptek. Dalam pilar politik-keamanan, kedua negara akan memperkuat kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan. Kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk menjalin kerja sama keamanan dan pertahanan untuk mengatasi ancaman non-tradisional di kawasan. Di pilar ekonomi dan pembangunan, kedua negara akan memperluas kerja sama perdagangan dan menghilangkan hambatan perdagangan. Fokus pilar ini adalah perluasan kerja sama pembangunan, kerja sama kebijakan energi dan pengembangan EBT, serta mengatasi tantangan iklim dan lingkungan. Pada pilar sosial budaya, kerjasama antar negara meliputi perluasan kerjasama pendidikan melalui pertukaran akademik, peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dan penguatan kerjasama iptek dan penelitian. Kedua negara juga menyepakati kerja sama damai melalui dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap keragaman.

Kemitraan AS-Indonesia tidak lepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Indonesia adalah negara majemuk, yang merupakan contoh nyata keberhasilan dalam menerapkan sistem demokrasi dengan toleransi antar umat beragama yang tinggi. Itulah sebabnya Amerika Serikat membutuhkan dukungan Indonesia dalam upayanya untuk mempromosikan demokrasi, perdamaian dunia, supremasi hukum dan toleransi beragama di seluruh dunia.

Secara ekonomi, Indonesia merupakan wilayah pasar penting bagi Amerika Serikat dengan lebih dari 200 juta penduduk. Seperti diketahui, produk China saat ini merajai pasar di Asia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Amerika Serikat harus mampu mengembangkan hubungan dagang yang menguntungkan dengan Indonesia untuk



dapat menguasai pasar Indonesia yang potensial. Tentu saja, Amerika Serikat berharap pasar Indonesia yang sebagian diambil alih oleh China, dapat diambil alih atau dialihkan ke produk Amerika.

Dari segi pertahanan, AS membutuhkan Indonesia untuk mengimbangi pengaruh China di Asia. Dengan demikian, kemitraan ini akan semakin memperjelas posisi Indonesia dalam persaingan strategis antara dua samudra dan dua benua, serta kemitraan komprehensif dengan Indonesia akan sangat mendukung kepentingan militer AS.

Selain itu, Amerika Serikat mewaspadaikan gagasan Presiden China Xi Jinping tentang Jalur Sutra Maritim, yang bersinergi dengan gagasan Presiden Jokowi tentang Poros Maritim Global. Kebijakan Jalur Sutra Laut China ini nantinya akan menghubungkan China dengan negara-negara Asia Tenggara, pesisir Samudra Hindia, mengitari Laut Merah, dan terakhir ke Eropa. Gagasan ini akan semakin mempercepat kerja sama China dengan Indonesia dan memperkuat kebijakan China. Posisi China dalam perdagangan internasional dan dalam bidang militer semakin kuat. Oleh karena itu, Amerika Serikat harus segera mengantisipasi gagasan penguatan kerja sama ini.

Posisi penting Indonesia di mata Amerika Serikat juga terlihat sehubungan dengan kuatnya pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam kaitannya dengan negara-negara ASEAN. AS membutuhkan Indonesia untuk melawan agresivitas China yang semakin meningkat di Laut China Selatan. Kepulauan Spratly diklaim oleh China dan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam. Amerika Serikat percaya bahwa pendekatan China yang semakin agresif, disertai dengan peningkatan kemampuan militernya, secara serius mengancam perdamaian di Asia Tenggara. Dari perspektif ini, Amerika Serikat sangat membutuhkan dukungan untuk upaya perdamaian di Asia Tenggara.



c. Utilisasi Kemitraan AS Terhadap Politik Luar Negeri China

Kemitraan strategis yang komprehensif antara Amerika Serikat dan Indonesia bukanlah satu-satunya cara Amerika Serikat dapat meningkatkan pengaruhnya di dunia. Ketika Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengunjungi Istana Bogor pada tanggal 31 Agustus 2018 dan bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, beliau menyatakan bahwa demi kepentingan nasional, perdamaian, keamanan dan stabilitas merupakan prasyarat penting untuk memajukan pertumbuhan dan kemakmuran dengan menghubungkan lima negara ke perjanjian kemitraan strategis yang komprehensif. Kemitraan strategis tersebut adalah Amerika dengan Australia, Jepang, Vietnam, India dan Indonesia. Inti dari lima pilar kemitraan adalah "Perlindungan Kepentingan Bersama". Indonesia memiliki kemitraan keamanan yang telah berlangsung lama dan produktif, terutama dengan lembaga penegakan hukum, intelijen, pertahanan, peradilan dan peradilan serta lembaga terkait lainnya. Pertimbangan keamanan dalam semangat persahabatan untuk kebaikan bersama sebagai bagian dari perdamaian, keamanan dan stabilitas regional, regional dan global. Pengambilan keputusan bersama dibangun untuk menghadapi tantangan dan persaingan, serta ancaman terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan kejahatan internasional. Bentuk kemitraan ini membuat China memahami bahwa kerjasama kemitraan strategis komprehensif beberapa negara dengan Indonesia dapat mengepung Negeri Tirai Bambu tersebut.

Kemitraan strategis dengan Indonesia, khususnya dalam urusan pertahanan dan angkatan laut, merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan kepentingan AS di Indo-Pasifik. Amerika saat ini memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan kerjasama, seperti latihan militer bersama dalam jangka menengah dan panjang, khususnya di Samudera Hindia. Dengan kesamaan visi Indo-Pasifik, kedua negara



tampak terburu-buru agar postur militer Indonesia dikembangkan dan digunakan secara efektif dalam rangka menjaga keamanan kawasan bersama.

Indonesia-AS yang memiliki kepentingan yang sama dalam masalah maritim telah sepakat untuk memperkuat kawasan ini. Pada Pemerintahan Indonesia sebelumnya, kedua negara menjalin kerja sama di bidang maritim berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) yang ditandatangani pada 18 September 2007. Sebagai acuan implementasi, Nota Kesepahaman ini juga dilengkapi dengan kesepakatan baru berupa Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 10 Juni 2010. Namun, Indonesia menilai kerjasama maritim ini belum optimal karena bidang penerapannya masih terbatas dalam konteks maritim. Kerja sama maritim sebelumnya tidak menjadi prioritas dalam tiga pilar kemitraan tersebut.

Salah satu bentuk dukungan nyata AS untuk sektor maritim Indonesia adalah pemberian hibah sebesar \$68 juta, dimana \$35 juta dialokasikan untuk Program Maritim Indonesia dan \$33 juta untuk program pemantauan penangkapan ikan ilegal yang sama. Amerika Serikat juga telah menyatakan dukungan untuk perlindungan tuna sirip kuning, yang 40 persennya hidup di perairan Indonesia, dan terumbu karang. Selain itu, *US National Oceanic and Atmospheric Administration* membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia untuk menyebarkan satelit baru yang dapat mendeteksi lampu kapal penangkap ikan, terutama kapal penangkap ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal di malam hari. Untuk meningkatkan kualifikasi personel angkatan laut Indonesia, Amerika Serikat juga mendukung pelatihan profesional siswa sekolah menengah Indonesia di industri perikanan dan kemudian bekerja sama dengan tiga universitas Amerika, yaitu University of Rhode Island dan University of Mississippi, dan Universitas Oregon.



Posisi Indonesia dan Amerika Serikat dalam kemitraan ini setara (*equal partnership*), namun ternyata posisi Indonesia masih berada di bawah Amerika Serikat. Hal ini karena Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam mengimplementasikan kemitraan komprehensif ini. Pemerintah harus menghilangkan hambatan tersebut agar Indonesia dapat memperoleh manfaat maksimal dari kemitraan ini. Hambatan utama adalah pelaksanaan program-program yang termasuk dalam kemitraan komprehensif. Meskipun rencana aksi dan prioritas telah ditetapkan untuk kemitraan komprehensif ini, program-program tersebut tidak dilaksanakan secara optimal karena kurangnya sinergi antar lembaga yang terlibat. Kendala lain adalah keterbatasan teknologi yang dimiliki Indonesia. Karena keterbatasan teknologi, Indonesia tidak dapat memaksimalkan potensi sumber daya alamnya seperti sektor maritim.

5. Kesimpulan

Kemitraan antara Amerika Serikat dan Indonesia merupakan kemitraan yang komprehensif dan cukup besar, tidak hanya untuk meningkatkan kondisi dan kemampuan negara, tetapi juga untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pengaruh negara lain. Besarnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan diperkuat dengan kerjasama yang luas tidak hanya dengan Indonesia tetapi juga dengan Australia, Jepang, Vietnam dan India.

Asia Tenggara memang merupakan lokasi yang strategis. Dengan pergerakan barang ekspor-impor dan kandungan kekayaan alam di bawah Laut Cina Selatan, sangat penting bahwa semua kekuatan besar dapat mempengaruhi dan berpartisipasi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara yang dipersatukan oleh ASEAN melihat ancaman dari China menggunakan kekuatan kerasnya dalam klaim China atas sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan. Meskipun kehadiran dan eksploitasi China di kawasan tidak bertentangan dengan kedaulatan masing-masing negara, namun terdapat perilaku kebijakan luar negeri China yang tidak hanya



menggunakan *soft power* untuk memajukan kepentingan nasional, tetapi juga *hard power*.

Kondisi geopolitik di kawasan Asia Tenggara yang panas membuat Amerika Serikat semakin melihat peluang dan ancaman di China. Kemitraan strategis komprehensif antara Amerika Serikat dan Indonesia serta beberapa negara lain bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri China.

Daftar Pustaka

- Budiono, K. (1987). *Hubungan Internasional : Kerangka Studi Analitis*. Jakarta : Binacipta.
- Codevilla, A., & Seabury, P. (2006). *War: Ends and Means*. Potomac Books, Inc.
- Creswell, J. W. (2014). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Dian, M., & Meijer, H. (2020). Networking hegemony: alliance dynamics in East Asia. *International Politics*, 57, 131-149.
- Gill, B., Goh, E., & Huang, C. H. (2016). The Dynamics of US–China–Southeast Asia Relations. *United States Studies Centre at the University of Sydney*.
- Goh, E. (2008). Hierarchy and the role of the United States in the East Asian security order. *International Relations of the Asia-Pacific*, 8(3), 353-377.
- Goh, E. (2019). Contesting Hegemonic Order: China in East Asia. *Security Studies*, 28(3), 614-644.
- Goldstein, J., & Pevehouse, J. (2014). The Globalization of International Relations. *International Relations*, 18.



- Grieco, Joseph M. "Realist theory and the problem of international cooperation: Analysis with an amended prisoner's dilemma model." *The Journal of Politics* 50.3 (1988): 600-624.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamilton-Hart, N., & McRae, D. (2015). Indonesia: balancing the United States and China, aiming for independence. *United States Studies Centre at the University of Sydney*, 14.
- Jervis, R. (2017). *Perception and misperception in international politics: New edition*. Princeton University Press.
- L Winger, G. (2012). Twilight on the British Gulf: The 1961 Kuwait crisis and the evolution of American strategic thinking in the Persian Gulf. *Diplomacy & Statecraft*, 23(4), 660-678.
- Lisbet (2015). PENGUATAN KEMITRAAN KOMPREHENSIF INDONESIA-AMERIKA SERIKAT. Info Singkat Hubungan Internasional, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Pengkajian Dta dan Informasi (P3DI) Sekretaris Jenderal DPR RI Vol. VII, No. 02/II/P3DI/Januari 2015.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making. *Review of International Studies*, 2(3), 246-266.
- Odgaard, L. (2007). *The balance of power in Asia-Pacific security: US-China policies on regional order*. Routledge.
- Organski, Abramo FK. *World politics*. Knopf, 1958.
- Roy, S. L. "Diplomacy, Jakarta, CV." (1991).
- Waltz, K. N. (1979). The anarchic structure of world politics. *International politics: enduring concepts and contemporary issues*, 29-49.